



JURNAL POLITEA

ISSN : 2621-0312

Vol. I No. I, 2018

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

FENOMENA POLITIK CEBONG DAN KAMPRET DI INDONESIA **Sebuah Analisis dari Perspektif Pemikiran Politik dalam Islam**

Abdulloh Hamid, Darwis, Santi Andriyani

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, Universitas Brawijaya Malang Indonesia, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

doelhamid@uinsby.ac.id, darwislhsby@gmail.com, santriandriyani6@gmail.com

ABSTRACT

Labelling cebong and kampret among supporters of Joko Widodo and Prabowo Subianto has been stronger in political phenomenon of Indonesia. This research aims to compare the political polarization after death of Prophet Muhammad with political polarization which is happening right now in Indonesia by using approach of Islamic political thought. This research also used library research as methodology of research to analyse the equal between bhoth phenomena in order to take lesson from the old phenomenon in mainting the unity of people in contemporary phenomenon exactly in Indonesia. The research found that to gain political power always cause polarization and conflict among people within society. Indonesian must learn from it to safeguard the unity of Indnesia as nation state.

Keywords: *Cebong, Kampret, Politic, Islamic Political Thought.*

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang cukup menonjol di media sosial sejak selesainya Pemilihan Presiden tahun 2014 hingga memasuki Pemilihan Presiden kembali di tahun 2019 adalah labelisasi cebong untuk para pendukung Joko Widodo dan kampret untuk pendukung Prabowo Subianto. Menurut Wawan Masudi seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa sebutan cebong dan kampret dari awal dilakukan warganet untuk mengelompokkan perbedaan pilihan politik masyarakat dan labelisasi semacam ini cukup menghangatkan situasi politik menjelang Pemilihan Umum (Stefanie, 2018). Jika kita berselancar di media sosial, baik *Facebook*, *Instagram*, atau *Twitter*, saling nyinyir menyinyiri antara dua kubu sudah dianggap biasa. Saling memberi label nama hewan cebong dan

kampret menjadi fenomena politik khas yang hanya terjadi di Indonesia. Wawan Masudi mengatakan bahwa fenomena politik semacam ini hampir tidak pernah terlihat dalam Pemilihan Umum di negara lain, setidaknya di Australia dan Norwegia (Stefanie, 2018).

Kondisi di atas menjadikan masyarakat terpolarisasi secara politik. Peristiwa persekusi dan penolakan antar kedua kubu cukup sering terdengar dalam pemberitaan media nasional dan menjadi perdebatan publik di ruang maya. Seorang ibu yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja mendapat intimidasi dari massa kaus #2019GantiPresiden di *Car Freed Day*, Bundaran HI, Minggu pagi (Amanaturrosyidah, 2018). Neno Warisman salah satu deklarator #2019GantiPresiden juga mendapat penolakan di Batam hingga Pekanbaru ketika ingin menghadiri tablig akbar dan deklarasi #2019GantiPresiden (Nugroho & Siagian, 2018). Ahmad Dhani salah satu inisiator #2019GantiPresiden di Surabaya juga ditolak oleh kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan gerakan tersebut, bahkan massa sempat mengepung hotel tempat dia menginap (Ferry & Sumirat, 2018).

Namun demikian, di tengah panasnya situasi politik nasional dan semakin menguatnya labelisasi cebong dan kampret sebenarnya banyak para tokoh mulai dari tokoh agama dan tokoh politik angkat bicara terkait sebutan istilah tersebut. KH Abdullah Gymnastiar yang populer dipanggil Aa Gym meminta kepada masyarakat supaya tidak menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk panggilan cebong dan kampret (Ikhsanudin, 2018). Pendakwah tersebut meminta masyarakat berhenti memakai istilah cebong dan kampret untuk menyebut kelompok yang berbeda pilihan politiknya karena akan merusak persaudaraan sebangsa dan senegara (Novianto, 2018). Sementara Ridwan Kamil sebagai seorang politisi meminta supaya istilah cebong dan kampret tidak lagi muncul di Pemilihan Presiden 2019 karena berbeda pilihan politik tidak harus diekspresikan dalam kata-kata kasar termasuk keluar kata-kata hewan (Ramdhani, 2018).

Atas dasar semakin menguatnya polarisasi politik terjadi di tengah masyarakat yang mengancam persatuan Indonesia. Maka dalam studi ini akan dikaji bagaimana mengelola perbedaan pilihan politik dengan mengambil pelajaran dari fakta historis di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Waktu itu konflik dan perpecahan telah menghancurkan persatuan umat Islam yang disebabkan masalah politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi ini menggunakan Pendekatan Studi Pemikiran Politik dalam Islam, fokus pada analisis polarisasi politik yang terjadi setelah wafatnya nabi yang dikomparasikan dengan polarisasi politik yang terjadi di Indonesia. Keterkaitan polarisasi yang terjadi di masyarakat dan kekuasaan politik menuntut pengelolaan secara bijaksana oleh pihak-pihak terkait demi tujuan persatuan antar umat dan bangsa.

Kajian Teori

Pemikiran Politik dalam Islam

Secara etimologi, politik berasal dari Bahasa Latin *politicus* atau *politicus*, artinya *relating to citizen* (hubungan warga negara), keduanya berasal dari kota polis, artinya kota dan dalam Bahasa Arab disebut *Siyasah* (سياسة - يسوس - ساس) memelihara, mengatur, sehingga politik dimaknai mengurus atau mengatur kepentingan seseorang, sedangkan terminologi politik pertama kali dikenal melalui buku Plato (*Politeia*), juga dikenal dengan (Republik), selanjutnya muncul karya Aristoteles dengan judul yang sama, kedua karya tersebut dianggap sebagai permulaan munculnya pemikiran politik yang berkembang kemudian, sehingga politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, politik dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, politik dipahami sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, politik dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, politik dipahami sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Luth et al., 2015).

Sejarah pemikiran politik dalam islam pada dasarnya dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama atau disebut dengan periode klasik adalah periode Nabi Muhammad yang membangun sebuah komunitas islam di Madinah pada tahun 622 M kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang empat yang dikenal dengan istilah *khulafaurrasyidin*, berlanjut lagi sampai munculnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250 M dan periode kedua atau disebut periode modern yang membiarkan nilai-nilai dari barat termasuk teori politik modern (Iqbal & Nasution, 2010). Sudrajat mengatakan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, mulai muncul persoalan di tubuh umat islam termasuk persoalan politik, yaitu persoalan siapa pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah (Sudrajat, 2015).

Politik dan Khalifah

Sebagaimana terekam dalam bacaan-bacaan sejarah bahwa pengganti (khalifah) Nabi Muhammad sebagai kepala negara secara bergantian adalah Abu Bakar al-Shiddiq, Umar Ibn al-Khattab, Usman Ibn al-Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Keempat khalifah atau pengganti nabi ini dalam diskursus Islam disebut dengan *Khulafaurrasyidin*. Menurut Nasution dalam (Sudrajat, 2015) “ada keunikan yang bisa ditemukan dalam proses suksesi dari satu khalifah ke khalifah yang lain dalam periode ini”. Dalam kata lain, setiap pengangkatan sebagai khalifah atau pemimpin berbeda-beda atau tidak terdapat prosedur yang pasti.

Hal ini terjadi pada prosesi pergantian empat khalifah secara berurutan; khalifah pertama, Abu Bakar mendapat pengakuan sebagai pengganti kepala negara di Madinah di hari kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar di pilih dalam satu forum di balai pertemuan Bani Saidah. Sedangkan Umar ibn ia-Khattab berbeda dengan pendahulunya. Dia mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah melalu wasiat langsung dari Abu Bakar. Naiknya Usman Ibn Affan sebagai khalifah ketiga ternyata melalu proses yang berbeda dengan dua orang pendahulunya. Usman Ibn Affan dipilih oleh sekelompok sahabat yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar Ibn al-Khattab sebelum wafat. Ketika sampai

di masa Ali Ibn Abi Thalib terjadi perkembangan yang berbeda. Khalifah sebelumnya meskipun hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tetapi pada tahap selanjutnya dapat diakui dan diterima oleh umat secara keseluruhan. Sedangkan penetapan Ali sebagai khalifah hanya diterima oleh sebagian saja dari Umat Islam (Sudrajat, 2015). Sejak saat itulah umat Islam terpecah belah dan terperangkap dalam konflik politik keras dan perang saudara yang memakan korban jiwa yang sangat banyak.

Pembahasan

Apabila kita *flashback* ke masa lalu, yaitu masa setelah wafatnya nabi. Fakta historis mencatat bahwa persoalan yang muncul pertama kali di tubuh umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah justru bukan yang berkaitan dengan agama, tetapi yang berkaitan dengan persoalan politik. Perselisihan yang timbul dalam diri umat Islam pada waktu itu berkenaan dengan siapakah sahabat yang menggantikan kedudukan nabi sebagai kepala pemerintahan di Madinah. Dalam kedudukannya sebagai utusan Allah, jelas sekali Nabi Muhammad SAW tidak dapat digantikan dan semua umat Islam sepakat serta meyakinkannya sebagai nabi pemungkas.

Kedudukannya Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara mestilah ada yang menggantikannya, karena hal itu menyangkut persoalan temporal, yaitu pembinaan dan keberlangsungan pembangunan komunitas Islam. Siapakah sahabat yang dianggap berhak menggantikan posisi nabi sebagai kepala negara? Di sini kaum muslimin berselisih pendapat sehingga pada akhirnya terjerumus ke dalam konflik politik berkepanjangan yang menyebabkan benturan-benturan keras sehingga mereka menyimpang dari jalan lurus yang selama ini sudah mereka lalui.

Pangkal konflik pertama kali muncul ketika terbunuhnya khalifah ketiga, Usman ibn Affan dalam suatu pemberontakan kemudian ditetapkannya Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ada pihak yang tidak setuju dan tidak mau mengikuti Ali, yaitu Muawiyah ibn Abi Sofyan, seorang gubernur Suria yang kebetulan juga keluarga Usman. Selanjutnya, setelah jabatan khalifah ada di tangan Ali, pemerintah diguncang oleh perpecahan di antara umat Islam sendiri. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Siti Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang berkedudukan di Makkah. Peperangan antara umat Islam tidak dapat dihindari. Terjadilah perang Jamal antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Dikenal dengan perang Jamal karena Siti Aisyah sebagai pemimpin pasukan dengan mengendarai Unta. Kemenangan dalam perang Jamal ada di kubu Ali. Setelah itu, pertempuran terjadi perang lagi di Shiffin.

Setelah terjadinya perang Shiffin (perang antara tentara Ali dan Muawiyah), umat Islam secara politik terpolarisasi ke dalam tiga kubu. Pertama, kubu yang setia kepada Ali, yang kemudian dikenal dengan nama Syi'ah. Kedua, kubu sempalan dari tentara Ali yang keluar karena tidak menerima rencana tahkim antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, yang kemudian disebut Khawarij. Ketiga, kubu yang setia kepada Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pertentangan segi tiga ini berlanjut dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib pada tahun kelima kekhalfahannya oleh Ibn Muljam, seorang pengikut Khawarij. Keadaan ini berimplikasi kepada adanya perbedaan pendapat terkait konsep Khilafah dan Imamah dalam pemikiran politik Islam hingga sekarang.

Saat ini, di Indonesia mau memasuki tahun politik. Jika diperhatikan secara teliti, masyarakat Indonesia secara politik terpolarisasi sekurang-kurangnya ke dalam dua kubu. Ada kesamaan-kesamaan kondisi antara polarisasi politik yang terjadi di masa sahabat dengan kondisi polarisasi politik yang sedang terjadi di Indonesia yang mendorong kita untuk menjadikannya sebuah pelajaran dalam kerangka menjaga persatuan. Salah satu kesamaan itu adalah sama-sama terpolarisasi secara politik. Hal ini terlihat dari fakta bagaimana perdebatan keras antara dua kubu selalu terjadi di ruang publik. Setelah Pilpres tahun 2014 sampai memasuki Pilpres 2019, masyarakat Indonesia secara politik terpolarisasi ke dalam kubu Joko Widodo dan kubu anti Joko Widodo atau bisa dikatakan kubu Prabowo Subianto. Seiring berjalannya waktu serta dampak media sosial, kedua kubu ini melahirkan dua istilah yang cukup fenomenal; yaitu istilah Cebong untuk pendukung Jokowi dan Kampret untuk sebaliknya.

Di media sosial, mereka saling menghujat bahkan ada yang menyebarkan hoax hanya demi saling menjatuhkan lawan politiknya. Memang negara kita menganut sistem demokrasi yang memungkinkan rakyatnya secara bebas mengeskpresikan pandangan politiknya. Tapi sebebapapun, apakah menghujat dan menyebarkan hoax dalam konteks demikian bisa dibenarkan? Kondisi polarisasi politik antara Cebong dan Kampret ini menarik perhatian banyak orang tak terkecuali para akademisi kemudian untuk ditulis atau dikaji dari banyak perspektif. Seperti dijelaskan di ala oleh seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada bahwa fenomena politik semacam ini hampir tidak pernah terjadi di negara yang lain, yaitu menggunakan istilah-istilah hewan untuk menyebut atau mengolok-olok orang yang berbeda pilihan politiknya. Hal ini terindikasi bahwa rakyat Indonesia belum matang dalam berdemokrasi.

Cebong sebagai sebuah istilah ternyata dimunculkan oleh kubu yang anti Joko Widodo dengan tujuan mengejek pendukungnya. Istilah ini dipakai tidak lepas dari kebiasaan Joko Widodo sendiri yang memiliki hobi memelihara kodok dan cebong di kolam istana negara supaya dapat merasakan suasana pedesaan yang dulu melekat dalam kehidupan Joko Widodo. Sedangkan istilah kampret sebagai respon ejekan cebong. Kampret merupakan binatang sejenis kelelawar yang suka tidur dengan posisi terbalik kaki di atas atau pada awalnya digunakan untuk memberi label terhadap seseorang yang sering menggunakan logika terbalik.

Secara fundamental, yang diperselisihkan antara cebong dan kampret ini adalah soal politik. Salah satu konseptual yang dijelaskan di awal bahwa politik dipahami sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Maka cebong dan kampret saling berusaha untuk meraih kekuasaan tertinggi di Indonesia atau setidaknya siapa yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Ini juga termasuk kesamaan-kesamaan yang sudah dijelaskan di awal. Di masa lampau, siapa yang berhak dan pantas menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah sehingga terjebak pada konflik politik berlarut-larut. Kalau masa sekarang, menurut *cebongers* Joko Widodo yang paling pantas memimpin Indonesia hingga dua periode karena Joko Widodo benar-benar membangun Indonesia secara nyata. Tapi bagi kampret, Prabowo Subianto jauh lebih layak maka 2019 harus ganti presiden. Seharusnya mereka bisa belajar dari masa lalu. Jangan sampai mereka terjerumus kepada perpecahan seperti yang sudah terjadi di masa sahabat

nabi. Bagaimana pun sikap politik dan pilihan presiden kita, persatuan bangsa Indonesia jauh lebih penting.

Simpulan

Kekuasaan politik sering membuat masyarakat terpolarisasi. Seharusnya masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur terpolarisasi secara politik ke dalam kubu cebong dan kubu kampret bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di masa lalu di zaman yaitu setelah wafatnya nabi. Waktu itu umat islam terperangkap dalam konflik politik berkepanjangan dan memakai korban yang sangat banyak. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menjamin semua masyarakatnya untuk memiliki pilihan politik yang dikehendakinya. Supaya demokrasi Indonesia semakin berkualitas, sudah saatnya meninggalkan labelisasi nama-nama hewan kepada orang yang berbeda pilihan politiknya. Adulah gagasan dan program supaya bangsa ini lebih maju dan beradab.

Oleh sebab itu, tanpa banyak alasan, sesungguhnya tidak perlu saling menghujat antara Cebong dan Kampret, apalagi menyebarkan hoax demi kepentingan politik jangka pendek, supaya persatuan bangsa tidak tersobek. Ingat! Polarisasi politik yang berlebihan dapat mengakibatkan perpecahan. Mari kita saling menghormati untuk saling menjaga NKRI. Apakah gara-gara kekuasaan, kita rela mengorbankan persatuan?

Daftar Pustaka

- Amanaturrosyidah, O. (2018, April 29). Bawaslu minta polisi segera tindak pelaku intimidasi di Car Free Day. *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparannews/bawaslu-minta-polisi-segera-tindak-pelaku-intimidasi-di-car-free-day>
- Ferry, O., & Sumirat, S. (2018). Ditolak di Surabaya, Dhani batal deklarasi #2019GantiPresiden. *Cnnindonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180826144104-20-325008/ditolak-di-surabaya-dhani-batal-deklarasi-2019gantipresiden>
- Ikhsanudin, A. (2018). Aa Gym minta jangan ada panggilan “kecebong” dan “kampret.” *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4104098/aa-gym-minta-jangan-ada-panggilan-kecebong-dan-kampret>
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Luth, T., Hamid, H., H., Rofi'i, A. H., Fathoni, K., Hasby, M. S., ... Nurchanifah, Mustapa, A., Makmur, S., Hana, M., Nurkudri, S., & F. (2015). *Buku dasar pendidikan agama Islam di Universitas Brawijaya*. Malang: UB Press.
- Novianto, H. (2018). Hentikan sebutan kecebong dan kampret. *Beritagar*. Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/berita/hentikan-sebutan-kecebong-dan-kampret>
- Nugroho, B. P., & Siagian, A. S. (2018). Penolakan untuk Neno Warisman : Batam hingga Pekanbaru. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4183785/penolakan-untuk-neno-warisman-batam-hingga-pekanbaru>
- Ramdhani, D. (2018). Ridwan Kamil minta “kecebong” dan “kampret” tak lagi muncul di Pilpres 2019. *Kompas.com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/08/20/14581001/ridwan-kamil-minta-kecebong-dan-kampret-tak-lagi-muncul-di-pilpres-2019>
- Stefanie, C. (2018). “Cebong dan kampret”, sinisme dua kubu nihil gagasan. *Cnnindonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709153148-32-312746/cebong-dan-kampret-sinisme-dua-kubu-nihil-gagasan>
- Sudrajat, A. (2015). *Sejarah pemikiran Islam dan Barat*. Malang: Intrans Publishing.

